

## **ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI BOGOR**

### **ANALYSIS OF VALUE FOR MONEY IN PERFORMANCE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY REPORT BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI BOGOR**

**A.B. Setiawan, W. Gusnita**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor

E-mail: [wennygustia@gmail.com](mailto:wennygustia@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*This research aims to analysis of performance accountability reports (LAKIP) and the performance of Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor using the method of performance measurement VFM which composed of three elements, that is economy, efficiency, and effectiveness the period of 2010-2014. Performance measurement in this research is based on kepmendagri number 690.900.327 year 2006 about performance measurement of economy, efficiency and effectiveness. LAKIP year 2010-2014 are according with the Work Plan of Balitnak Ciawi year 2010-2014, but the goal of the year 2010 there is one activity the walk is not in accordance with what was planned. In addition to the goal of 3 years from 2010 until 2013 still have not been achieved or not in according with the work plan. Measurement VFM with elements of the economy in 2010 - 2014, said LAKIP economy and very economic with the achievement of > 100%, but in 2011 there is one activity with code 017 runs less the economy. Measurement VFM with elements of efficiency in 2010 - 2014, LAKIP said to be efficient and highly efficient by achieving 100% -> 100%, but in 2011 there is one activity with 017 runs less efficient code. While the measurement of the elements of effectiveness VFM years 2010 - 2014, LAKIP said to be effective and very effective at achieving the 90% -> 100%. In addition to the 3 2010-2013 target activity is not effective or ineffective VFM said. This is because the new achievement of the targets set in 2014.*

**Keywords :** *Performance Measurement, LAKIP, VFM, Economy, Efficiency and Effectiveness.*

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh harga saham dan frekuensi perdagangan saham terhadap *bid-ask spread* pada perusahaan manufaktur yang melakukan *stock split*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang melakukan *stock split* yang terdiri dari 28 perusahaan. Penentuan sampel penelitian yang berjumlah 24 perusahaan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Sedangkan untuk pengujian hipotesis dan instrumen penelitian menggunakan alat analisis regresi berganda SPSS 20.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: harga saham tidak berpengaruh terhadap *bid-ask spread*. Sedangkan frekuensi perdagangan saham berpengaruh terhadap *bid-ask spread*.

Kata Kunci: Harga Saham, Frekuensi dan *Bid-ask Spread*

## PENDAHULUAN

Instansi pemerintah dikatakan sebagai unsur dalam aparatur negara yang berkaitan dengan pemerintahan, instansi pemerintah merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat terhadap pemerintah dalam membangun sesuai bidangnya. Instansi pemerintah adalah satu dari sumber penting dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam melaksanakan pembangunan nasional (*good governance*). Berhasil atau tidaknya instansi dalam mensukseskan dan mewujudkan pembangunan nasional didukung oleh beberapa faktor penting, diantaranya sistem pelaporan keuangan instansi dan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja pemerintahan kini telah menjadi perhatian publik masyarakat karena meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi dan transparansi terhadap pelaporan keuangan. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis menuntut adanya transparansi atas laporan keuangan dan akuntabilitas publik oleh lembaga pemerintahan khususnya sektor publik di Indonesia. Tuntutan masyarakat sesuai dengan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan, dimana penyelenggaraan pemerintah daerah disini sebagai sub sistem pemerintahan negara yang bertujuan meningkatkan daya guna serta hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Dalam menciptakan dan meyelenggarakan *good governance*, dilakukan dengan mengemban tiga fungsi yaitu fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang atau jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi yang meliputi pendapatan dan kekayaan, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang mencakup pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. Singkatnya, *good governance* ialah pemerintahan yang bersih, transparan, ekonomi, efektif, dan akuntabel.

Perubahan dan perkembangan akan kinerja pemerintahan ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 53 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tersebut tentang petunjuk teknis perjanjian kerja. Sedangkan, UU Nomor 17 Tahun 2003 memuat tentang keuangan Negara. Dimana

pemerintah melaksanakan dan melakukan pengelolaan keuangan negara dengan tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, ekonomi, efektif, dan bertanggung jawab, serta dasar dalam perencanaan dan penyusunan anggaran, yang salah satunya adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Konsep *performance based budgeting* menuntut dilakukannya keterkaitan anggaran dengan kinerja. Hasil pengukuran ABK merupakan akuntabilitas yang menjadi *output* kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas tidak hanya kemampuan menunjukkan bagaimana sumber yang diperoleh instansi pemerintah tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi memperhitungkan kemampuan pemerintah dalam menunjukkan sumber dana instansi pemerintah telah dibelanjakan dan digunakan sesuai dengan ketentuannya, serta sesuai dengan apa yang telah dianggarkan instansi pemerintah pada tahun anggaran terkait. Akuntabilitas publik terkait pada kewajiban untuk menjelaskan serta menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang direncanakan, dan akan dilaksanakan organisasi publik. Pada dasarnya, tujuan ABK tersebut ialah hasil kinerja yang dapat dikatakan sebagai pengukuran kinerja yaitu Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tujuan akhir AKIP adalah instansi terkait diharapkan dapat mengerti, memahami, dan mampu mengimplementasikan Sistem Anggaran Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan lingkup kewenangannya dan pengukuran kinerja instansi pemerintah dilaporkan dalam bentuk LAKIP yang sesuai dengan Renja tahun anggaran terkait dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengukuran kinerja yang menjadi faktor penting organisasi khususnya bidang pemerintahan, termasuk pada sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi dalam menghasilkan pelayanan dan kinerja yang lebih baik serta tepat sasaran. Adapun pedoman penilaian kinerja tertulis pada kepmendagri nomor 690.600-327 tahun 1996 yang diganti dengan kepmendagri nomor 47 tahun 1999 tentang penilaian kinerja. Selain itu, pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga kriteria. Pertama, untuk

memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada serta dalam pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban serta memperbaiki hubungan kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Sektor publik seringkali dinilai sebagai sarang pemborosan, penyerapan anggaran yang tidak sesuai, serta realisasi anggaran yang melebihi target anggaran yang sudah dianggarkan oleh pagu dipa, sehingga munculnya tuntutan baru agar organisasi lebih memperhatikan kinerjanya, hasil dari pengukuran kinerja tersebut haruslah dilaporkan dalam bentuk pertanggung jawaban kinerja. Ada beberapa cara dalam pengukuran kinerja, antara lain *balanced scorecard* dan VFM, sedangkan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah VFM. Metode BSC digunakan untuk menilai kinerja dari segi keuangan dan non keuangan berdasarkan perspektif. Sedangkan VFM digunakan karena pengukuran kinerja bersifat multidimensional yang artinya tidak ada satu indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja instansi pemerintah secara komprehensif. Selain itu, ditemukannya permasalahan pada tahun 2015 dalam penelitian Ardila dan Putri pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Sumatera Utara bahwa presentasi realisasi melebihi anggaran yaitu diatas 100%, hal itu menandakan kinerja instansi tidak sesuai dengan ketentuannya.

Telah diketahui bahwa kinerja suatu perusahaan tidak lagi dianggap baik jika hanya dilihat dari laporan keuangannya saja, tetapi dapat dilihat dari suatu LAKIP. VFM yang merupakan inti dalam melakukan pengukuran kinerja pada sektor publik dikarenakan kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi secara garis lurus harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Ekonomi berarti mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing bidang dan mampu membuat keputusan atau pengayaan dengan melihat pada sumber daya yang ada.

Efisiensi berarti hubungan antara *input* dan *output* untuk mencapai tujuan tertentu, yang berarti tepat guna dalam melakukan suatu kegiatan, sedangkan efektivitas berarti pencapaian suatu organisasi sesuai dengan

visi dan misi serta rencana kerja dalam periode terkait. VFM dapat tercapai apabila suatu organisasi telah menggunakan *input* paling rendah untuk mencapai *output* yang maksimal sebagai bentuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi selain VFM ada juga akuntabilitas. Akuntabilitas yang merupakan *output* penilaian kinerja berupa LAKIP yang wajib dilaporkan. Kinerja pemerintah yang dilaporkan dalam LAKIP ini dibuat atau direncanakan sesuai dengan Restra (Rencana Strategis) dengan jangka waktu 5 tahun.

Adapun salah satu instansi pemerintah di Bogor yang menarik perhatian penelitian ini ialah Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Ciawi Bogor yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ternak, Balitnak terletak di jalan veteran desa Cibedug. Balitnak merupakan satu dari sekian entitas akuntansi di bawah kementerian pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan CaLK. Selain itu, instansi pemerintahan diwajibkan membuat dan melaporkan akuntabilitas kinerja instansi dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran.

Pada laporan keuangan Balitnak dapat dilihat LAKIP pada TA 2010-2014 dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pagu dan Realisasi Belanja TA 2010-2014

Kegiatan (TA)	Anggaran (000)	Target (000)	Realisasi
2010	26.888.068	26.888.068	25.772.732.334
2011	29.184.046	29.184.046	27.914.474.000
2012	69.610.262	69.610.262	67.120.216.638
2013	69.610.262	69.610.262	67.120.216.638
2014	35.823.056	35.823.056	33.581.391.853

Sumber: Balitnak Ciawi, 2016 (Data diolah kembali)

Pada tabel diatas, dapat dilihat tingkat kebutuhan, anggaran yang ditetapkan dan belanja setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dengan tingkat pencapaian realisasi tertentu. Tetapi terdapat ketidaksesuaian pada Tabel 1.1 dengan pagu dan realisasi anggaran belanja tahun 2012, dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1.2 Pagu dan Realisasi Belanja TA 2012

Kode	Jenis Belanja	Pagu DIPA		Realisasi Belanja	
		Rp	Bobot	Rp	Ttb

			(%)		(%)
51	Belanja Pegawai	18.617.522.000	20,18	17.591.102.064	94,49
52	Belanja Barang	11.427.863.000	12,39	10.914.345.293	95,51
53	Belanja Modal	62.199.490.000	67,43	59.911.742.336	96,32
	Total	92.244.875.000	100	88.417.189.693	95,85

Sumber: Balitnak Ciawi, 2016 (Data diolah kembali)

Dapat disimpulkan berdasarkan tabel 1.2 pagu dan realisasi belanja TA 2012, LAKIP tidak akurat. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan pencatatan (*Human error*), kesalahan pada komputer (*software*), dan ketidaksesuaian rencana kerja strategis dengan laporan akuntabilitas atau LAKIP yang dilaporkan Balitnak Ciawi Bogor.

Mardiasmo (2009) mengemukakan definisi anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*. Menurut Bastian, (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Sedangkan pengertian kinerja keuangan menurut Jumingan (2006) adalah gambaran keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Mardiasmo (2009) VFM merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*).

Mardiasmo (2009) juga membagi indikator VFM menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)

Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Tujuan VFM pada elemen ekonomi adalah hemat dan

cermat dalam pengadaan kegiatan dan alokasi sumber daya yang ada di balitnak.

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Akan tetapi, keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja dan terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

LAKIP merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian sebagai perwujudan *Good Governance* dan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu LAKIP merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tugas atau sasaran strategis, yang mengacu pada Perencanaan Strategik (Restra), Rencana Kerja Pemerintah (Renja/RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKTm). Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

Pemerintah pula telah mengeluarkan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana kerja pemerintah (Renja/RKP) dan PP Nomor 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja dalam Peraturan Menteri Keuangan No 54/PMK.02/2005 dan membangun aplikasi program komputer RKA-KL. Pada LAKIP terdapat laporan realisasi anggaran pendapatan, laporan pagu dan realisasi anggaran belanja per jenis belanja dan laporan realisasi anggaran per *ouput* kegiatan yang dilaporkan setiap tahun anggaran. LAKIP juga berisi kegiatan kegiatan yang mencakup kinerja instansi

pemerintah selama periode tertentu. LAKIP disusun satu kali dalam satu tahun yang berisikan laporan kinerja Balitnak selama satu tahun yang disampaikan ke Puslitbang Peternakan dalam bentuk laporan target dan realisasi kinerja. LAKIP terdiri dari Rencana Kerja (Renja), E-Program, Monev, pelaporan, kandang kebun percobaan laboratorium, *feedmill* dan kesehatan hewan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian LAKIP dengan rencana kerja pemerintah (RKP) di Balitnak Ciawi Bogor dan menganalisis kinerja Balitnak menggunakan metode VFM yaitu ekonomi, efisien, dan efektif dengan tahun anggaran 2010-2014.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai VFM dan LAKIP Balitnak Ciawi Bogor. Selain itu, bagi Instansi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Balai Penelitian Ternak (BALITNAK) dalam mengelola dan melaporkan anggaran khususnya pada LAKIP. Serta bagi lingkungan akademik, penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun anggaran 2010-2014. Penelitian deskriptif ini untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan tertentu dari subjek yang diteliti dan mendapatkan informasi mengenai LAKIP dengan menggunakan analisis *Value for Money* (VFM). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak instansi pemerintah BALITNAK. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen perusahaan seperti data anggaran perusahaan berupa LAKIP tahun anggaran 2010-2014.

Analisis VFM pada LAKIP berdasarkan tiga elemen ekonomi, efisien dan efektif tersebut menggunakan data anggaran berupa LAKIP tahun 2010-2014 bertujuan melihat pencapaian kinerja instansi pemerintah BALITNAK Ciawi Bogor.

1. Ekonomi

Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan *input* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2002).

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Anggaran biaya}}{\text{Realisasi biaya}} \times 100\%$$

LAKIP dapat dikatakan ekonomi apabila hasil perhitungan semakin tinggi, berikut kriteria ekonomi ialah:

Tabel 3.1 Kriteria Pengukuran Ekonomi

Rasio Ekonomi	Kriteria Ekonomi
75% - keatas	Sangat ekonomi
60% - 75%	Ekonomi
45% - 60%	Cukup ekonomi
30% - 45%	Kurang ekonomi
Kurang dari 30%	Tidak ekonomi

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 47, (1999)

2. Efisiensi  
Efisiensi menurut Mardiasmo, (2009) untuk menghitung efisiensi ialah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Pengukuran Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
75% - keatas	Sangat efisien
60% - 75%	Efisien
45% - 60%	Cukup efisien
30% - 45%	Kurang efisien
Kurang dari 30%	Tidak efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 47, (1999)

3. Efektivitas  
Efektivitas menurut Mardiasmo dan Makhfath, (2005) untuk menghitung efektivitas ialah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran rasio efektivitas sama dengan ekonomi dan efisiensi, apabila nilai rasio semakin tinggi maka semakin baik

tingkat efektivitas. Adapun kriteria pengukuran efektivitas sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
75% - keatas	Sangat efektif
60% - 75%	Efektif
45% - 60%	Cukup efektif
30% - 45%	Kurang efektif
Kurang dari 30%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 47, (1999)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1 Rencana Kerja (Renja) TA 2010-2014

Berdasarkan orientasi *output*, kegiatan penelitian dan pengembangan di Balitnak diarahkan pada 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Kegiatan utama yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan mendukung PSDS/K.
2. Kegiatan strategis yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan untuk mempercepat pematangan teknologi meningkatkan efektifitas pemanfaatan sumberdaya penelitian (misalnya konsorsium, insentif ristek, dll).
3. Kegiatan *in house* yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi teknologi dan diseminasi sesuai tusi Balitnak.

Kegiatan penelitian Balitnak TA 2010-2014 diantaranya:

1. Pengkayaan, pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetika ternak, tanaman pakan ternak serta mikroba peternakan dan veteriner.
2. Perakitan rumpun ternak dan tanaman pakan ternak sesuai kebutuhan.
3. Perakitan inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas ternak dan tanaman pakan ternak hasil pemuliaan, serta akselerasi produksi dan penyebaran bibit unggul untuk mempercepat adopsi rumpun unggul baru.
4. Penelitian dalam menghasilkan teknologi produksi pendukung peningkatan produktivitas ternak dan tanaman pakan ternak, serta

teknologi panen dan pasca panen primer.

5. Penelitian dan pengembangan sistem integrasi ternak dengan komoditas pangan, perkebunan dan hortikultura.
6. Pengembangan sistem perbibitan ternak dan tanaman pakan ternak, serta produksi bibit/benih sumber.
7. Penelitian serta pengembangan peternakan berbasis kemitraan.
8. Diseminasi dan promosi hasil penelitian serta pengembangan peternakan.

### 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Balitnak sebagai lembaga penelitian nasional mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional (*good governance*) khususnya dibidang peternakan di Indonesia. Balitnak dituntut dapat berperan lebih besar terutama dalam mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis serta memiliki peran secara kongkrit dalam pembangunan pertanian khususnya sektor peternakan di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 71/Kpts/OT.210/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang organisasi dan tata kerja, pada pasal 2, dinyatakan bahwa Balitnak mempunyai tugas melaksanakan penelitian untuk meningkatkan efisiensi produk gternak unggas, sapi perah dan dwiguna, kerbau, domba, kambing perah, serta aneka ternak. Adapun tujuan yang akan dicapai Balitnak tahun 2010 - 2014 ditetapkan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pasar *input* dan *output* dengan menghasilkan teknologi bibit dan benih unggul, teknologi pengolahan dan pengembangan bahan pakan.
2. Meningkatkan kapasitas produksi dan kompetensi Balitnak dengan menghasilkan berbagai teknologi penyediaan dan perbanyak bibit, pakan dan teknologi produksi.
3. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi dasar untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang seperti terjadinya

perubahan selera dan prefensi konsumen.

4. Mengefektifkan berbagai metoda dan media mengintensifkan berbagai model kerjasama kelembagaan untuk mendistribusikan insentif teknologi secara porposional untuk mewujudkan sistem pertanian industrial.

Sasaran Balitnak yang diharapkan akan dicapai pada tahun 2010-2014, yaitu:

1. Tersedianya inovasi teknologi tinggi dan strategis dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mutu dan nilai tambah produk yang bermanfaat bagi pengguna.
2. Tersedianya teknologi dan sumberdaya genetika baru serta sumberdaya genetika yang berkaitan dengan peternakan.
3. Tersedianya inovasi teknologi yang lebih berkualitas.
4. Tersedianya jaringan kerjasama dan pertukaran informasi teknologi peternakan.
5. Tersebar dan teradopsinya inovasi teknologi kepada pengguna yang lebih luas, masing UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian.

### 1. Pengukuran Ekonomi

Pada pengukuran ekonomi dapat dilihat dari nilai anggaran belanja dan nilai realisasi belanja, adapun kegiatan penelitian di Balitnak adalah:

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Ekonomi TA 2010

KODE	Anggaran	Realisasi	Nilai rasio (%)	Kriteria
237263	26.888.068.000	25.772.732.34	104,3	Sangat ekonomi
04.03.04	9.154.256.000	8.745.282.960	104,6	Sangat ekonomi
1571	9.154.256.000	8.745.282.960	104,6	Sangat ekonomi
1571.0002	70.000.000	68.973.150	101,4	Sangat ekonomi
1571.0009	80.000.000	79.831.800	100	Sangat ekonomi
1571.0029	99.900.000	82.292.100	121,3	Sangat ekonomi
1571.0051	217.300.000	208.155.950	104,3	Sangat ekonomi
1571.0088	151.000.000	134.617.100	112,1	Sangat ekonomi
1571.0117	42.000.000	41.968.100	100	Sangat ekonomi
1571.0	68.140.000	61.383.300	111	Sangat

0119				ekonomi
1571.00159	123.420.000	123.108.800	100	Sangat ekonomi
1571.00167	687.000.000	39.811.400	108,0	Sangat ekonomi
1571.00235	40.000.000	39.811.400	100	Sangat ekonomi
1571.00239	48.000.000	47.766.300	100	Sangat ekonomi
1571.00269	125.800.000	125.318.000	100	Sangat ekonomi
1571.00277	67.000.000	66.250.000	101,1	Sangat ekonomi
1571.00285	375.500.000	365.866.700	102,6	Sangat ekonomi
1571.00289	25.000.000	24.930.000	100	Sangat ekonomi
1571.00290	130.000.000	127.280.000	102,1	Sangat ekonomi
1571.00296	120.000.000	119.600.000	100	Sangat ekonomi
1571.00406	400.000.000	359.190.200	111,3	Sangat ekonomi
1571.00464	1.000.000.000	952.254.400	105,0	Sangat ekonomi
1571.00469	89.800.000	87.299.600	102,8	Sangat ekonomi
1571.00470	1.094.552.000	1.073.294.200	101,9	Sangat ekonomi
1571.00474	50.000.000	49.243.900	101,5	Sangat ekonomi
1571.01165	1.157.556.000	1.083.101.110	106,8	Sangat ekonomi
1571.02175	16.000.000	15.840.000	101,0	Sangat ekonomi
1571.02270	60.000.000	57.644.000	104,1	Sangat ekonomi
1571.04621	133.398.000	133.166.000	100	Sangat ekonomi
09	17.733.812.000	17.027.449.374	104,1	Sangat ekonomi
0001	15.947.262.000	15.323.297.027	104,0	Sangat ekonomi
0001.0001	15.947.262.000	15.323.297.027	104,0	Sangat ekonomi
0002	1.786.550.000	1.704.152.347	104,8	Sangat ekonomi
0002.00034	10.000.000	9.800.000	102,0	Sangat ekonomi
0002.00205	127.200.000	125.730.800	101,1	Sangat ekonomi
0002.00206	22.000.000	21.664.500	101,5	Sangat ekonomi
0002.00250	169.514.000	149.820.600	113,1	Sangat ekonomi
0002.00256	39.950.000	39.577.750	100	Sangat ekonomi
0002.01138	299.700.000	295.450.000	101,4	Sangat ekonomi
0002.02007	546.000.000	530.963.601	102,8	Sangat ekonomi
0002.02176	64.000.000	63.187.200	101,2	Sangat ekonomi
0002.04863	499.186.000	462.601.696	107,9	Sangat ekonomi
Jumlah	26.888.068.000	25.772.732.334	104,3	Sangat ekonomi

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Ekonomi TA 2011

KODE	Anggaran	Realisasi	Nilai Rasio (%)	Kriteria
------	----------	-----------	-----------------	----------

1806	29.184.046.000	27.914.474.000	104,54	Sangat ekonomi
01	18.874.000.000	18.433.706.000	102,38	Sangat ekonomi
02	122.000.000	110.056.000	110,85	Sangat ekonomi
03	140.800.000	116.200.000	121,17	Sangat ekonomi
04	2.010.210.000	921.379.000	218,17	Sangat ekonomi
05	1.562.600.000	1.440.050.000	108,51	Sangat ekonomi
07	952.974.000	944.842.000	100,86	Sangat ekonomi
09	451.000.000	423.674.000	106,45	Sangat ekonomi
10	1.750.000.000	1.623.422.000	107,79	Sangat ekonomi
12	400.000.000	394.781.000	101,32	Sangat ekonomi
17	85.116.000	273.265.000	31,14	Kurang ekonomi
18	1.870.000.000	1.719.783.000	108,73	Sangat ekonomi
28	535.346.000	284.598.000	188,10	Sangat ekonomi
29	140.000.000	139.900.000	100,07	Sangat ekonomi
32	90.000.000	88.814.000	101,33	Sangat ekonomi
Jumlah	29.184.046.000	27.914.474.000	104,54	Sangat ekonomi

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

Tabel 4.3 Hasil perhitungan ekonomi TA 2012

KODE	Anggaran	Realisasi	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1806	92.244.875.000	88.417.189.693	104,33	Sangat ekonomi
004	2.846.805.000	2.668.481.550	262,38	Sangat ekonomi
005	1.084.985.000	1.073.431.600	101,07	Sangat ekonomi
007	4.784.125.000	4.656.041.200	102,75	Sangat ekonomi
009	496.700.000	484.763.100	102,46	Sangat ekonomi
010	1.680.475.000	1.638.721.000	102,54	Sangat ekonomi
012	647.590.000	641.129.900	101,00	Sangat ekonomi
013	290.600.000	290.376.600	100	Sangat ekonomi
017	293.108.000	289.644.200	101,19	Sangat ekonomi
018	1.648.600.000	1.575.604.300	104	Sangat ekonomi
994	20.717.522.000	19.506.573.407	106,21	Sangat ekonomi
995	2.662.000.000	2.544.315.000	103,05	Sangat ekonomi
996	779.001.000	713.277.423	109,21	Sangat ekonomi
997	31.438.362.000	30.358.826.050	103,55	Sangat ekonomi
998	22.915.002.000	21.976.004.363	104,27	Sangat ekonomi
Jumlah	92.244.875.000	88.417.189.693	104,33	Sangat ekonomi

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Ekonomi TA 2013

KODE	Anggaran	Realisasi	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1806	69.610.262.000	67.120.216.638	103,71	Sangat ekonomi
004	3.262.101.000	3.024.343.520	107,86	Sangat ekonomi
005	1.882.684.000	1.720.020.015	109,46	Sangat ekonomi
009	686.598.000	637.410.300	109,46	Sangat ekonomi
010	7.104.711.000	6.899.923.608	102,96	Sangat ekonomi
012	970.900.000	850.131.208	114,20	Sangat ekonomi
018	3.571.700.000	3.449.325.156	103,55	Sangat ekonomi
032	50.000.000	47.212.600	105,90	Sangat ekonomi
994	23.286.118.000	22.283.689.750	104,49	Sangat ekonomi
997	12.436.175.000	12.277.558.381	101,29	Sangat ekonomi
998	16.359.275.000	15.930.602.100	109,69	Sangat ekonomi
Jumlah	69.610.262.000	67.120.216.638	103,71	Sangat ekonomi

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Ekonomi TA 2014

KODE	Anggaran	Realisasi	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1806	35.146.743.000	33.581.391.853	106,67	Sangat ekonomi
004	2.660.199.000	2.541.714.045	104,66	Sangat ekonomi
005	1.525.610.000	1.503.355.020	101,48	Sangat ekonomi
009	439.000.000	431.965.100	101,63	Sangat ekonomi
010	3.856.842.000	3.824.614.850	100,84	Sangat ekonomi
012	928.606.000	880.518.800	105,46	Sangat ekonomi
018	1.945.709.000	1.929.607.520	100,83	Sangat ekonomi
032	800.000	800.000	100	Sangat ekonomi
994	23.756.290.000	21.803.803.718	108,95	Sangat ekonomi
998	710.000.000	655.812.800	108,26	Sangat ekonomi
Jumlah	35.823.056.000	33.581.391.853	106,67	Sangat ekonomi

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

## 2. Pengukuran Efisiensi

Adapun hasil pengukuran efisiensi tahun 2010–2014 di Balitnak ialah:

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Efisiensi TA 2010

KODE	Input	Output	Nilai	Kriteria
------	-------	--------	-------	----------



			Rasio (%)	
237263	95,85	100	104	Sangat efisien
04.03.04	95,53	100	104,68	Sangat efisien
1571	95,53	100	104,68	Sangat efisien
1571.00002	99,96	100	100	Sangat efisien
1571.00009	99,79	100	100	Sangat efisien
1571.00029	82,37	100	121,40	Sangat efisien
1571.00051	95,79	100	104	Sangat efisien
1571.00088	89,15	100	112	Sangat efisien
1571.00117	99,92	100	100	Sangat efisien
1571.00119	90,08	100	111	Sangat efisien
1571.00159	99,75	100	100	Sangat efisien
1571.00167	92,55	100	108	Sangat efisien
1571.00235	99,53	100	100	Sangat efisien
1571.00239	99,51	100	100	Sangat efisien
1571.00269	99,62	100	100	Sangat efisien
1571.00277	98,88	100	101	Sangat efisien
1571.00285	97,43	100	102,63	Sangat efisien
1571.00289	99,72	100	100	Sangat efisien
1571.00290	97,91	100	102	Sangat efisien
1571.00296	99,67	100	100	Sangat efisien
1571.00406	89,80	100	111	Sangat efisien
1571.00464	95,23	100	105	Sangat efisien
1571.00469	97,22	100	102,85	Sangat efisien
1571.00470	98,06	100	101,97	Sangat efisien
1571.00474	98,49	100	101,53	Sangat efisien
1571.01165	93,57	100	106,87	Sangat efisien
1571.02175	99,00	100	101	Sangat efisien
1571.02270	96,07	100	104	Sangat efisien
1571.04621	99,83	100	100	Sangat efisien
09	96,02	100	104	Sangat efisien
0001	96,09	100	104	Sangat efisien
0001.00001	96,09	100	104	Sangat efisien
0002	95,39	100	104,83	Sangat

0002.00034	98,00	100	102	efisien
0002.00205	98,84	100	101	Sangat efisien
0002.00206	98,48	100	101	Sangat efisien
0002.00250	88,38	100	113	Sangat efisien
0002.00256	99,07	100	100,93	Sangat efisien
0002.01138	98,58	100	101	Sangat efisien
0002.02007	97,25	100	102,82	Sangat efisien
0002.02176	98,73	100	101	Sangat efisien
0002.04863	92,67	100	107,90	Sangat efisien

Sumber: Balitnak, 2016 (Data diolah)

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efisiensi TA 2011

KODE	Input	Output	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1806	95,65	100	104,54	Sangat efisien
01	97,66	100	102	Sangat efisien
02	90,21	100	110,85	Sangat efisien
03	82,53	100	121	Sangat efisien
04	45,83	100	218	Sangat efisien
05	94,33	100	106	Sangat efisien
07	99,15	100	101	Sangat efisien
09	93,94	100	106	Sangat efisien
10	92,77	100	107,79	Sangat efisien
12	98,69	100	101	Sangat efisien
17	321,05	100	31,14	Kurang efisien
18	91,97	100	108,73	Sangat efisien
28	53,16	100	188	Sangat efisien
29	99,93	100	100	Sangat efisien
32	98,68	100	101	Sangat efisien

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Efisiensi TA 2012

KODE	Input	Output	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1806	95,85	100	104	Sangat efisien
004	93,74	100	106,68	Sangat efisien
005	98,94	100	101	Sangat efisien
007	97,32	100	102,75	Sangat efisien
009	97,51	100	102,55	Sangat efisien
010	99,00	100	101	Sangat efisien
012	99,92	100	100	Sangat efisien
013	98,82	100	101	Sangat efisien
017	95,57	100	104,63	Sangat efisien
018	94,15	100	106	Sangat efisien
994	97,04	100	103	Sangat efisien
995	91,56	100	109	Sangat efisien
996	96,56	100	103	Sangat efisien
997	96,56	100	104	Sangat efisien

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Efisiensi TA 2013

KODE	Input	Output	Nilai Rasio	Kriteria
------	-------	--------	-------------	----------

			(%)	
1806	96,42	100	103,71	Sangat efisien
004	92,71	100	107,86	Sangat efisien
005	91,36	100	109	Sangat efisien
009	92,84	100	107,71	Sangat efisien
010	97,12	100	103	Sangat efisien
012	87,56	100	114	Sangat efisien
018	96,57	100	103	Sangat efisien
032	94,43	100	106	Sangat efisien
994	95,70	100	104	Sangat efisien
997	98,72	100	101	Sangat efisien
998	97,38	100	102,69	Sangat efisien

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Efisiensi TA 2014

KODE	Input	Output	Nilai Rasio (%)	Kriteria
1806	93,74	100	106,67	Sangat efisien
004	95,55	100	104,66	Sangat efisien
005	98,54	100	101	Sangat efisien
009	98,39	100	101,64	Sangat efisien
010	99,16	100	101	Sangat efisien
012	94,82	100	105	Sangat efisien
018	99,17	100	101	Sangat efisien
032	100	100	100	Sangat efisien
994	91,78	100	108,96	Sangat efisien
998	92,37	100	108,26	Sangat efisien

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

### 3. Pengukuran Efektivitas

Adapun hasil perhitungan pengukuran kinerja efektivitas dilakukan berdasarkan data capaian kinerja dan target kinerja sesuai dengan data sasaran yang sudah ditetapkan oleh Balitnak Ciawi tahun anggaran 2010-2014, hasil pengukuran tersebut, ialah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Efektifitas Tahun 2010-2014

Tahun	Indikator Kinerja	Nilai Rasio (%)	Kriteria
<b>Sasaran Kinerja 1</b>			
2010	1	100	Sangat efektif
	2	83,33	Sangat efektif
	3	157,93	Sangat efektif
	4	50	Cukup efektif
	5	100	Sangat efektif
2011	1	115,38	Sangat efektif
	2	115,38	Sangat efektif
	3	141,51	Sangat efektif
	4	100	Sangat efektif
	5	114,28	Sangat efektif
2012	1	123,07	Sangat efektif
	2	75	Efektif
	3	524,71	Sangat efektif
	4	150	Sangat efektif
	5	100	Sangat efektif
2013	1	200	Sangat efektif

2014	2	109,09	Sangat efektif
	3	397,74	Sangat efektif
	4	166,67	Sangat efektif
	5	136,84	Sangat efektif
	1	142,85	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif
	3	286,00	Sangat efektif
	4	200	Sangat efektif
	5	166,67	Sangat efektif

#### Sasaran Kinerja 2

2010	1	100	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif
2011	1	100	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif
2012	1	100	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif
2013	1	100	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif
2014	1	150	Sangat efektif
	2	114,28	Sangat efektif

#### Sasaran Kinerja 3

2010	1	0	Tidak efektif
2011	1	0	Tidak efektif
2012	1	0	Tidak efektif
2013	1	0	Tidak efektif
2014	1	300	Sangat efektif

#### Sasaran Kinerja 4

2010	1	166,67	Sangat efektif
2011	1	700	Sangat efektif
2012	1	400	Sangat efektif
2013	1	250	Sangat efektif
2014	1	233,33	Sangat efektif

#### Sasaran Kinerja 5

2010	1	100	Sangat efektif
2011	1	100	Sangat efektif
2012	1	153,33	Sangat efektif
2013	1	100	Sangat efektif
2014	1	233,33	Sangat efektif

#### Sasaran Kinerja 6

2010	1	266,67	Sangat efektif
2011	1	220,51	Sangat efektif
2012	1	640	Sangat efektif
2013	1	238,89	Sangat efektif
2014	1	292,85	Sangat efektif

#### Sasaran Kinerja 7

2010	1	100	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif
2011	1	100	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif
2012	1	100	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif
2013	1	100	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif
2014	1	100	Sangat efektif
	2	100	Sangat efektif

#### Sasaran Kinerja 8

2010	1	460,83	Sangat efektif
	2	-	-
2011	1	92,1	Sangat efektif
	2	-	-

2012	1	124,8	Sangat efektif
	2	-	-
2013	1	135,45	Sangat efektif
	2	-	-
2014	1	165,45	Sangat efektif
	2	-	-

Sumber: Balitnak (Data diolah, 2016)

Pada sasaran 8 bagian 2 (dua) tidak terdapat nilai rasio hal ini dikarenakan tidak adanya target yang ditentukan oleh Balitnak Ciawi Bogor, hanya pencapaian kinerja yang dihasilkan pada saat kegiatan/program berlangsung. kegiatan tersebut tidak ditargetkan karena jumlah hasil sampel uji lab penelitian/ eksplorasi hanya untuk kegiatan internal Balitnak dan hal ini tergantung oleh banyaknya kegiatan yang berlangsung.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembahasan Rencana kerja Pada LAKIP

Pencapaian rencana kerja pada LAKIP dapat dilihat pada tabel perbandingan capaian indikator kinerja utama dari tahun 2010-2014, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Rencana kerja sasaran 1 (satu) pada LAKIP sudah terealisasi dengan cukup baik, pada tahun 2010 terdapat 1 (satu) program yang cukup efektif, hanya terealisasi setengah dari apa yang sudah ditargetkan. Pada tahun 2011, 2013 dan 2014 Renja pada LAKIP sesuai dengan apa yang ditargetkan, bahkan pencapaiannya melebihi apa yang sudah direncanakan Balitnak. Sedangkan, ditahun 2012 ada satu kegiatan kurang terselenggara dengan baik. kegiatan tersebut terselenggara kurang baik dikarenakan Balitnak melebihi target atau anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebagai batas akhir peneluaran tertinggi.
- b. Rencana kerja sasaran 2 pada LAKIP semuanya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- c. Rencana kerja sasaran 3 pada LAKIP kurang terealisasi dengan baik, hal ini dikarenakan apa yang telah direncanakan baru terealisasi pada tahun ke 5 dengan pencapaian yang

maksimal. Oleh karena itu, Balitnak meningkatkan target ditahun 2012 sebanyak 2 (dua) akan tetapi masih belum terlaksana, sehingga Balitnak menetapkan target awal ditahun 2010 dan menghasilkan kinerja yang maksimal.

- d. Rencana kerja sasaran 4 (empat) pada LAKIP sudah sesuai dengan Renja tahun 2010 - 2014, realisasi Renja melebihi target yang dianggarkan, hal ini menunjukkan kegiatan/program terealisasi dengan sangat baik.
- e. Rencana kerja sasaran 5 (lima) pada LAKIP sudah terealisasi dengan sangat baik, hal ini menunjukkan kinerja Balitnak pada TA 2010-2014 dikatakan baik.
- f. Rencana kerja sasaran 6 (enam) pada LAKIP sudah sesuai dengan Renja tahun 2010 - 2014, realisasi Renja dapat melebihi target yang dianggarkan, hal ini menunjukkan kegiatan/program terealisasi dengan sangat baik, bahkan mencapai 3 kali lipat dari apa yang ditargetkan.
- g. Rencana kerja sasaran 7 (tujuh) pada LAKIP sudah terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Renja sudah sesuai semua dengan apa yang direncanakan Balitnak.
- h. Rencana kerja sasaran 8 (delapan) pada LAKIP sudah baik, akan tetapi pada kegiatan hasil sampel uji lab penelitian/ eksplorasi tidak ditargetkan oleh Balitnak dikarenakan penelitian ini hanya kegiatan internal Balitnak dan tergantung pada banyaknya kegiatan.

### 2. Pembahasan Hasil Perhitungan Ekonomi

#### a. Pembahasan Hasil Perhitungan Ekonomi TA 2010-2014

Hasil perhitungan LAKIP menggunakan rasio ekonomi pada tahun 2010 dengan menggunakan metode VFM dikatakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitnak Caiwi Bogor dengan sangat ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi LAKIP tahun 2010 dikatakan sangat ekonomi. Pada tahun 2011, dari 16 program kerja/ kegiatan Balitnak hanya 1 (satu) kegiatan kurang ekonomi dengan nilai rasio 31,14 %, sedangkan kegiatan lainnya sangat ekonomi. Hasil

perhitungan ekonomi ditahun 2012 LAKIP seluruh kegiatan dikatakan sangat ekonomi dengan pencapaian lebih dari 100%. Hasil perhitungan ekonomi ditahun 2013, semua kegiatan dikatakan sangat ekonomi. Selain itu kegiatan di tahun 2014 dengan sangat ekonomi.

#### b. Pembahasan Hasil Perhitungan Efisiensi TA 2010-2014

Pengukuran efisiensi pada LAKIP Balitnak Ciawi Bogor tahun 2010, VFM dikatakan sangat efisien dengan pencapaian kinerja >100% dengan jumlah 42 kegiatan dikategorikan sangat efisien. Perhitungan efisiensi di tahun 2011 hanya 1 kegiatan kurang efisien, sedangkan hasil perhitungan kegiatan lainnya sangat efisien. Hasil perhitungan efisiensi pada tahun 2012 rata-rata kegiatan >100% hal ini menunjukkan bahwa VFM ditahun 2012 sangat efisien. Hasil perhitungan tahun 2013 VFM dikatakan sangat efisien pada semua kegiatan. Sedangkan ditahun 2014 dengan VFM dikatakan sangat efisien dengan pencapaian > 75%.

#### c. Pembahasan Hasil Perhitungan Efektivitas TA 2010-2014

Pada hasil perhitungan efisiensi tahun 2010 pada sasaran 1, kegiatan 1, 2, 3, dan 5 efektif, sedangkan kegiatan 4 (empat) cukup efektif. Sedangkan sasaran 2 tahun 2010 semua kegiatan sangat efektif. Sasaran 3 tidak efektif, sasaran 4 sangat efektif, sasaran 5 sangat efektif, sasaran 6 sangat efektif, sasaran 7 sangat efektif begitupula dengan sasaran 8 sangat efektif.

Hasil perhitungan efektivitas tahun 2011 pada sasaran 1 seluruh kegiatan sangat efektif. Sasaran 2 pada tahun 2011 semua kegiatan sangat efektif, sasaran 3 kegiatan tidak efektif, sasaran 4, 5, 6, 7 dan 8 tahun 2011 seluruh kegiatan terselenggara dengan sangat efektif. Perhitungan efektivitas di tahun 2012 pada sasaran 1, kegiatan 1, 3, 4 dan 5 sangat efektif, kegiatan 2 efektif. Sasaran 2 semua kegiatan efektif, sasaran 3 kegiatan tidak efektif, sasaran 4,5, 6, 7 dan 8 efektif.

Hasil perhitungan tahun 2013 pada sasaran 1 semua kegiatan dikatakan sangat efektif. sasaran 2 semua kegiatan terealisasi dengan sangat efektif, sasaran 3 kegiatan tidak efektif, sasaran 4, 5 dan 6 sangat efektif, sasaran 7 efektif dan sasaran 8 sangat efektif. Sasaran 1 tahun 2014 kegiatan 2 sangat efektif. Sasaran 2 semua kegiatan dikatakan sangat efektif, sasaran 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sangat efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim dan Syam, Kususfi. 2013. **Akuntansi Sektor Publik**. Salemba Empat. Jakarta.
- Agoes, Sukrisno. 2001. **Standar Profesional Akuntan Publik**. Salemba Empat. Jakarta.
- Anisa, Dian. 2011. **Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money**. Skripsi Sarjana. Fakultas Ekonomi. Universitas Hassanudin. Makassar.
- Ardila, Isna dan Putri, Ayu Anindya. 2015. **Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi**. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 15 No 1/Maret. Universitas Muhammadiyah. Sumatera Utara.  
Diambil dari <http://www.jurnal.umsu.ac.id>
- Ayuningtyas, Putri Ardi. 2011. **Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Periode 2009-2011**. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. Soepriyanto, Gatot. 2002. **Sistem Akuntansi Sektor Publik Konsep Untuk Pemerintah Daerah**. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2001. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. **Akuntansi Sektor Publik Suatu pengantar**. Erlangga. Jakarta.
- Barnet, Chris. Julian, Bar. Angela, Christie. Belinda, Duff. Shaun, Hext. 2010. **Measuring the Impact and Value for Money of Governance & Conflict Programmes**. ITAD. Diambil dari <http://www.dfid.gov.uk>
- Carlin, Tyrone M. 2004. **Output Based Budgeting and The Management**. Macquarie Graduate School of Management. Sydney.
- Deddi, Nordiawan dan Ayuningtyas, Hertianti. 2011. **Akuntansi Sektor Publik**. Salemba Empat. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja.
- Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor. 2012. **Pedoman Penulisan Skripsi**. Bogor.

- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. **Analisis Kritis atas Laporan Keuangan**. Grafindo Persada. Jakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kewajiban Instansi Pemerintah Menetapkan rencana Kerja Strategis
- Isti'anah. 2010. **Penerapan dan Implementasi Analisis Berbasis Kinerja**. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol 5 No 1/Januari. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Jumingan. 2006. **Analisa Laporan Keuangan**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). 2005. **SAKIP dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik**. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. **Akuntansi Sektor Publik Edisi IV**. BPFE. Yogyakarta.
- Meri, A dan Khairani, S. 2012. **Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada PDAM Tirta Musi Palembang**. Jurnal 2010210085. Fakultas Ekonomi. STIE MDP. Palembang.
- Muindro, Renyowijoyo. 2008. **Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba**. Mitra Wicana Media. Jakarta.
- Mulyadi. 2001. **Sistem Akuntansi**. Edisi 3. Cetakan ketiga. Salemba empat. Jakarta.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2007. **Analisis Penerapan Value For Money Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta**. DIY.
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)**. Cetakan ketiga. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id) (Desember 2015)
- [www.balitnak/litbang.pertanian.go.id](http://www.balitnak/litbang.pertanian.go.id) (April 2016)
- [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (Januari 2016)
- [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id) (Juli 2015)
- [www.perencanaan.ipdn.ac.id](http://www.perencanaan.ipdn.ac.id) (Maret 2016)
- [www.perpustakaan.uns.ac.id](http://www.perpustakaan.uns.ac.id) (Februari 2016)
- [www.jurnal.umsu.ac.id](http://www.jurnal.umsu.ac.id) (Februari 2016)